

DISENGAGEMENT DARI JEBAKAN TERORISME; ANALISIS PROSES DERADIKALISASI MANTAN NAPI TERORIS

Saifudin Asrori

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: saifudin.asrori@uinjkt.ac.id

Abstract: The effort of Jihadists on empowerment of former terrorist prisoner as interesting and unique phenomena. The jihadist involvement on reintegration of Former Terrorist Prisoner as a mutual aid for many disengaged Islamic extremists struggle with the transition back into society without an adequate help. This article aims to explore the effort of Jihadis on disengagement and reintegration ex-extremists initiative programs. How do they engage on delimiting of radical ideologies through community and economic development programs and reintegrate the extremist into society. This article conclude that the jihadists engagement in the empowerment initiatives as an alternate of government de-radicalization programs of former terrorist prisoner. This group became the 'new community' for ex-extremists to express various views and believe without concealment. The presence of this group is a potential asset in promoting narratives against radicalism and terrorism in Indonesia.

Keywords: reintegration, Jihadists, economic development, Indonesia

Abstrak: Upaya Jihadis untuk memberdayakan mantan tahanan teroris sebagai fenomena yang menarik dan unik. Keterlibatan jihadis dalam reintegrasi Bekas Tahanan Teroris sebagai bantuan timbal balik bagi banyak ekstrimis Islam yang berjuang dengan transisi kembali ke masyarakat tanpa bantuan yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya para Jihadis pada pelepasan dan reintegrasi program-program inisiatif mantan ekstremis. Bagaimana mereka terlibat dalam pembatasan ideologi radikal melalui program pembangunan masyarakat dan ekonomi dan

mengintegrasikan kembali ekstremis ke dalam masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa keterlibatan para pejuang dalam inisiatif pemberdayaan sebagai alternatif dari program deradikalisasi pemerintah dari mantan tahanan teroris. Kelompok ini menjadi 'komunitas baru' bagi mantan ekstremis untuk mengekspresikan berbagai pandangan dan kepercayaan tanpa penyembunyian. Kehadiran kelompok ini adalah aset potensial dalam mempromosikan narasi melawan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: re-integrasi, eks-Jihadists, pengembangan ekonomi, Indonesia

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemerintah dalam pemberantasan aksi terorisme memberikan hasil yang menggembirakan, sayangnya proses rehabilitasi dan deradikalisasi mantan Napi Teroris (Napiter) masih menjadi permasalahan. Sebagian besar eks-napiter memulai ‘hidup baru’ tanpa bantuan yang memadai. Sebagian kembali ke kelompoknya, melakukan aksi kekerasan dan teror. Aksi bom bunuh diri di beberapa kantor polisi, gelombang eksodus ke Suriah dan Mindanao dilakukan oleh kelompok ekstremis setelah keluar dari penjara. Pada spektrum yang lain, aksi terorisme menunjukkan perubahan karakter, dalam serangan bom bunuh diri yang dilakukan atas tiga geraja di Surabaya pada bulan Mei 2018 dilakukan oleh mereka yang teradikalisasi secara mandiri (*self-radicalized lone wolves*) dan merupakan bagian dari sel-sel teroris yang lebih tidak terorganisir dan hierarkis. Kondisi tersebut, menjadi tantangan tersendiri upaya pemberantasan tindak terorisme. Lebih dari itu, meneguhkan kesimpulan banyak pihak terkait kegagalan program deradikalisasi di Indonesia.¹

Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang terjadi.” UU Terorisme mengamanatkan *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme* (BNPT) untuk melakukan program deradikalisasi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga/institusi pemerintah, masyarakat terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme. Sayangnya, beberapa kajian menyimpulkan bahwa perubahan atau penghapusan pemikiran radikal merupakan target ambigius dari deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44154828>

realistik adalah menjauhkan atau memisahkan (*disengaging*) individu dan kelompok meninggalkan kelompok teroris.²

Kajian tentang pemberantasan tindak pidana kekerasan dan ekstremisme membedakan pengertian antara *disengagement* (memutus-ikatan/keluar) dan *de-radicalization* (deradikalisasi).³ Kondisi *disengagement* merupakan proses ketika seorang atau sekelompok pelaku teror tidak lagi melakukan kekerasan dan/atau meninggalkan jaringan teroris. Perubahan tersebut disebabkan oleh bermacam sebab, umumnya perubahan terjadi menyangkut kondisi personal. Sedangkan *de-radicalization* adalah upaya untuk menetralsir dan menghilangkan paham dan ideologi radikal bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal pro- kekerasan. Hasil dari proses deradikalisasi adalah perubahan kognitif, yaitu ketika seorang penganut paham radikal mengubah pemahamannya secara mendasar. Deradikalisasi membutuhkan perubahan kualitatif dalam sikap, nilai, proses fisik, sosial dan psikologi.⁴

Beberapa kajian telah mengidentifikasi kondisi individu dan kelompok meninggalkan kelompok teroris. Studi Chernov Hwang (2018) berdasarkan profiling atas 50 anggota mantan kelompok ekstrimis yang terlibat dalam konflik etnis-agama di Poso, menyimpulkan bahwa *disengagement* dapat terjadi atas beberapa kondisi utama yaitu; 1) kekecewaan terhadap kepemimpinan kelompok; 2) kesadaran bahwa biaya yang ditanggung jauh lebih besar dari pada manfaatnya; 3) terjalannya persahabatan dengan kelompok lain di luar jaringan kelompok militan; dan 4) perubahan ambisi pribadi seperti melanjutkan pendidikan, memiliki anak dan keluarga.⁵ Temuan serupa oleh Barrelle

² Bjorge, Tore & John Horgan (eds.), (2009). *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*, New York: Routledge

³ Horgan, J. (2008). Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation. *Perspectives on Terrorism*, 2(4), 3-8.

⁴ Chalmers, I. (2017). Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists. *Asian Studies Review*, 41(3), 331-351.

⁵ Hwang, J. C. (2018). *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*. Cornell University Press; Hwang, Julie Chernov, Rizal Panggabean, and Ihsan Ali Fauzi (2013). "The disengagement of jihadis in Poso, Indonesia." *Asian Survey* 53, no. 4: 754-777.

(2015) dan Harris-Hogan (2017) yaitu kelalahan fisik atau psikologis,⁶ serta dinamika hubungan negatif antar individu dalam kelompok teroris mendorong individu memikirkan kembali harapan dan keinginannya.⁷ Kajian Hwang juga menemukan fakta bahwa program pemerintah seringkali bersifat ad hoc dan tidak konsisten hanya memainkan peran kecil dalam keputusan individu dalam proses *disengagement*. Para ahli sepakat bahwa program rehabilitasi dan deradikalisasi baru dapat dilakukan setelah proses *disengagement* berjalan dengan baik.⁸

Kajian tentang kekerasan dan ekstremisme telah menangkap perlunya melihat sejumlah unsur makro dan mikro yang melatarbelakangi mengapa seorang individu maupun kelompok meninggalkan kelompok ekstrim. Proses dan dinamika *disengagement* melibatkan dua unsur penting, yaitu "*push and pull factors*". Terkait *push factor* mencakup antara lain harapan keterlibatan dalam kelompok teroris tidak tercapai, kekecewaan terhadap kelompok, kekecewaan terhadap individu, kesulitan menyesuaikan diri terhadap gaya kelompok, ketidakmampuan menghadapi efek dari aksi teror, kehilangan kepercayaan pada ideologi, dan kebosanan. Sedangkan *pull factors*, merupakan faktor struktural seperti terbelahnya loyalitas, terbangunnya hubungan positif dengan kelompok moderat, kesempatan pekerjaan dan pendidikan, keinginan untuk menikah atau membangun keluarga, insentif finansial dan amnesti.⁹

Sayangnya, upaya menarik-keluar teroris dari kelompok radikal berbasis ideologi keagamaan mengalami berberapa hambatan. Bagi anggota kelompok radikal, keluar dari kelompok ekstremis dinaggap sebagai tindakan ketidaktaatan terhadap keyakinan agama, keluar dari agama atau *murtad*. Lebih dari itu, manfaat keanggotaan dalam

⁶ Barrelle, Kate. (2015) "Pro-integration: disengagement from and life after extremism." *Behavioral sciences of terrorism and political aggression* 7, no. 2: 129-142.

⁷ Harris-Hogan, Shandon (2017). "Violent extremism in Australia: An overview." *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 491: 1.

⁸ Bjorge, Tore & John Horgan (eds.), *..op., cit.*,

⁹ Altier, Mary Beth, Emma Leonard Boyle, Neil D. Shortland, and John G. Horgan. (2017) "Why they leave: An analysis of terrorist disengagement events from eighty-seven autobiographical accounts." *Security Studies* 26, no. 2: 305-332.

kelompok ekstremis Islam biasanya mencakup perlindungan dan cara-cara implementasi ajaran agama yang akan mendapatkan pahala ‘keabadian’ di surga.¹⁰ Kondisi tersebut menguatkan kesimpulan Jacobson; “tidak ada satu alasan menyeluruh dan jelas mengapa individu atau kelompok meninggalkan jaringan atau organisasi teroris.”¹¹ Juga bagaimana memberikan asistensi terhadap teroris yang meninggalkan kelompoknya (*disengaged extremist*) masih menjadi menjadi perdebatan.

Artikel ini berusaha mengelaborasi keterlibatan *disengaged* ekstremis jaringan Lamongan dalam deradikalisasi mantan narapidana teroris (Napiter). Jaringan ini dikenal media nasional maupun internasional atas keterlibatan beberapa pemuda berasal dari daerah tersebut dalam rangkaian aksi Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005). Para aktivis eks-*Jihadis* merupakan kelompok militan keagamaan tanpa kekerasan (*non-violent religious militan*) yang berfungsi diantaranya menurut Appleby sebagai, “menegakkan tradisi keagamaan yang diyakini sebagai wawasan spiritual, teologis dan praktek yang berguna dalam mencegah konflik mematkan atau membatasi penyebarannya”.¹² Para aktivis eks-*Jihadis* seperti obat penawar atas racun kekerasan menggunakan agama. Transformasi gerakan mantan Napiter dalam upaya deradikalisasi teroris atau mantan teroris berkontribusi bagi pencegahan kembalinya napiter dalam kelompok atau organisasi teroris.

Metode

Pengumpulan data keterlibatan *disengaged* ekstremis jaringan Lamongan dalam deradikalisasi mantan narapidana teroris (Napiter)

¹⁰ Rabasa, A., Pettyjohn, S. L., Ghez, J. J., & Boucek, C. (2010). *Deradicalizing Islamist Extremists*. RAND Corp Arlington VA National Security Research Div.

¹¹ Jacobson, Michael. (2010) "Terrorist dropouts." *Learning from those who have left (Policy Focus, 101)*, Washington: The Washington Institute for Near East Policy, 75

¹² Appleby, S.R. (1999) *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers, hlm, 7

dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap tiga kelompok yaitu; (a) Aktivis Yayasan Lingkar Perdamaian; (b) Pengasuh Pondok Pesantren al-Islam, Solokuro, Lamongan; (b) Guru Taman Pendidikan al-Qur'an. Pada penelitian ini sumber data primer penulis dapatkan melalui wawancara dengan 15 narasumber. Sementara observasi dilakukan untuk menggali pemahaman tentang potensi ex-jihadis dalam upaya deradikalisasi mantan Napiter di tingkat mikro, meso, dan makro. Sementara data sekunder dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, media cetak, media elektronik, dan sebagainya.

Memahami Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan salah satu proses mengarahkan individu atau kelompok meninggalkan perilaku kekerasan. Hasil dari deradikalisasi terlihat dari dua dimensi yaitu dimensi ideologis dan perilaku. Pada dimensi ideologis dapat dilihat dari perubahan cara pandang individu, peningkatan kepercayaan pada sistem sosial yang berlaku, keinginan menjadi bagian dari masyarakat, dan penolakan terhadap sarana non-demokratis. Sedangkan deradikalisasi perilaku menekankan perubahan dalam aspek tindakan individu yaitu penghentian keterlibatan pada tindak kekerasan.¹³ Hal ini tidak bisa diartikan bahwa individu atau kelompok yang terpapar dengan ide-ide radikal tidak lagi berusaha untuk membawa perubahan politik, melainkan bahwa tujuan perubahan politik dilakukan dengan tidak merusak sistem sosial yang berlaku, melalui sarana yang sesuai dengan sistem hukum demokratis.

Istilah deradikalisasi berasal kata 'radikal' yang mempunyai arti generik "berpegang pada akar persoalan".¹⁴ Sebutan radikalisme, baik yang mewakili sayap politik "kiri" atau "kanan" dari sebuah spektrum

¹³ Rabasa, A., Pettyjohn, S. L., Ghez, J. J., & Boucek, C. (2010). *Deradicalizing Islamist Extremists*. RAND Corp Arlington VA National Security Research Div.

¹⁴ Charles, Tilly (1978). *From mobilization to revolution*. Reading, Addison-Wesley Publishing. Hlm. 1

pengelompokan politik, seringkali memiliki konotasi yang sama, yakni “berjuang menuju perubahan secara cepat melawan kelompok politik yang berseberangan”¹⁵. Silber dan Bhatt (2007) mendefinisikan “...proses mencari, menemukan, mengadopsi, menumbuhkan dan mengembangkan...sistem kepercayaan ekstrem yang menjadi sarana bagi perilaku teror”.¹⁶ Sehingga ada kecenderungan bahwa pandangan dan sikap-sikap politik-keagamaan yang radikal mempunyai arti sebuah pandangan yang anti-dialog dan perdebatan, serta hampir selalu menentang batas-batas norma yang berlaku. Karenanya radikalisme dan sikap-sikap politik radikal seringkali merupakan istilah yang “mendefinisikan dirinya sendiri” (*self-serving term*). Dalam pengertian yang lebih spesifik, radikalisme berarti “... kecenderungan untuk berada pada posisi ekstrim dalam skala konflik ideologi politik”.¹⁷

Dengan mengambil dua model pengertian tersebut, penelitian ini mendefinisikan istilah radikalisme—atau tepatnya radikalisasi, sebagaimana beberapa ahli seperti Ashour (2009), Mc Cauley dan Moskalenko (2008), Maghaddam (2006), yaitu sebuah proses untuk menganut atau mempromosikan suatu sistem ideologi dan kepercayaan ekstrem untuk tujuan menyediakan kerangka pembenaran bagi tindak kekerasan dalam menempuh perubahan-perubahan sosial, politik, dan keagamaan.¹⁸ Pengertian hampir serupa dari Lentini (2008b) “...merupakan proses dimana individu mengembangkan, mengadopsi dan meyakini sikap politik dan cara berperilaku yang berbeda secara dengan sistem politik yang sah, sosial, ekonomi, budaya dan nilai keagamaan yang ada dalam masyarakat...juga berkeinginan untuk

¹⁵ Lipset, S. M., & Raab, E. (1970). *The politics of unreason: right wing extremism in America, 1790-1970* (Vol. 5). New York: Harper & Row, h. 3.

¹⁶ Silber, M. D., Bhatt, A., & Analysts, S. I. (2007). *Radicalization in the West: The homegrown threat* (pp. 1-90). New York: Police Department. Ada beberapa istilah lainnya yang sering digunakan untuk menggambarkan radikalisme yaitu militan, extremis, zealot, dan fundamentalis.

¹⁷ *Ibid.*, h. 14

¹⁸ Ashour, O. (2009). *The de-radicalization of Jihadists: Transforming armed Islamist movements*. Routledge. McCauley, C., & Moskalenko, S. (2013). Two Possible Profiles of Lone-actor Terrorists. *This report represents the views and opinions of the contributing authors. The report does not represent official USG policy or position.*, Moghaddam, F. M. (2005). The staircase to terrorism: A psychological exploration. *American psychologist*, 60(2), 161.

merubah atau berusaha mengganti status quo...dan bentuk yang digunakan adalah menggunakan kekerasan.”¹⁹ Bjorgo (2013) proses tersebut biasanya terjadi dikarenakan keterlibatan individu dalam kelompok.²⁰ Karena radikalisme dimengerti sebagai proses, maka pandangan dan sikap radikal seseorang hampir bisa dikatakan selalu muncul dalam bentuk ideologi dan nilai-nilai sistem kepercayaan yang diperoleh individu itu melalui kelompok, gerakan atau organisasi sosial yang memperkenalkannya.

Penelitian Lipset dan Raab (1970) tentang sejarah gerakan ekstrim di Amerika dan Eropa Barat pada awal abad 20, menunjukkan bahwa paham atau perilaku keagamaan radikal dalam sejarahnya seringkali terkonsolidasi melalui aktivisme sosial dan keagamaan dalam gerakan yang terorganisir.²¹ Radikalisme politik-keagamaan didefinisikan oleh Lipset (1968) sebagai “... sebuah sikap percaya dan mempropmosikan sebuah sistem ideologi ekstrem yang menyediakan kerangka pembenaran bagi tindakan-tindakan kekerasan dalam menempuh perubahan sosial, keagamaan dan politik secara cepat.” Tambiyah (2001:13),²² seorang ahli politik konflik antar-etnis di Asia Selatan, mengatakan bahwa dalam radikalisasi “... individu secara bertahap mengadopsi ideologi ekstremis agama politik ... yang melegitimasi kekerasan sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial”. Menurutnya, menjadi radikal bukanlah persoalan perubahan psikologis yang terjadi dalam rentang waktu yang singkat. Merujuk pada pengalaman radikalisasi yang terjadi pada gerakan pro-kemerdekaan di kalangan masyarakat Tamil di Sri Lanka, ia menengarai bahwa terdapat empat fase kritis di mana transformasi menjadi radikal berproses di lingkungan anggota dan aktifis organisasi-organisasi radikal: (1) *Pra-Radikalisasi*, dipahami sebagai fase di mana individu mempunyai pandangan politik yang relatif moderat dalam hubungannya dengan

¹⁹ Lentini, P. (2008). Understanding and combating terrorism: Definitions, origins and strategies. *Australian Political Studies Association*, 43(1), 133-140.

²⁰ Bjorgo, T., & Bjorgo, T. (2013). *Strategies for preventing terrorism*. Springer.

²¹ S. Lipset dan Earl Raab, *The Politics of Unreason...* 12.

²² Tambiah, S. J. (1996). *Ethnonationalist conflicts and collective violence in South Asia*. University of California Press.

perjuangan menjadi negara merdeka; (2) *Identifikasi diri*, yakni individu mulai menganalisa secara aktif untuk terlibat perjuangan kemerdekaan melalui “membuka diri secara kognitif” yang muncul akibat beberapa faktor seperti krisis personal, sosial-ekonomi atau politik; (3) *Indoktrinasi*, yakni fase intensifikasi di mana yang bersangkutan mulai berkenalan dengan ide-ide tentang kemerdekaan dan bagaimana memperjuangkannya. Secara intensif dan bertahap ia menjadi bagian dari cita-cita organisasi pro-kemerdekaan. Terjadi kontak dan sosialisasi dengan “pemimpin spiritual” yang kharismatis dan kelompok kecil individu yang berpikiran sama; (4) *Martir atau Syahid*, di mana individu mendefinisikan dirinya sebagai seorang *martir*, atau pada akhirnya, merasa terpilih sebagai martir yang siap membunuh dirinya untuk kepentingan ideology dia yakini. Berdasarkan logika politik radikal di atas, bisa dikatakan bahwa, tindak kekerasan atau terorisme merupakan konsekuensi akhir dari proses radikalisasi.

Sayangnya, sebutan teroris seringkali dilekatkan oleh kelompok yang berseberangan. Sebutan teroris tergantung dari siapa yang melihat dan menilai serta dari kelompok mana orang itu berasal. Oleh karena itu penting diingat kadang terdapat garis tipis antara siapa teroris dan siapa pahlawan. Menurut, James Lutz dan Brenda Lutz bahwa seorang pejuang kemerdekaan untuk satu kelompok bisa jadi dianggap seorang teroris bagi kelompok lain yang berseberangan.²³ Artinya, sebutan ini tergantung dari siapa yang melihat dan menilai serta dari kelompok mana orang itu berasal. Oleh karena itu, betapapun kata teror ataupun terorisme memiliki makna yang ‘negatif’, tetap diperlukan kehati-hatian dalam penyebutan seseorang sebagai teroris, atau mencap sebuah kelompok atau grup sebagai kelompok melakukan tindakan terorisme.

Secara etimologis, kata ‘teror’-- sebagai akar dari kata terorisme—berasal dari bahasa Latin *terrere* yang artinya membuat seseorang gemetar atau merasa ngeri karena ketakutan. Para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan istilah terorisme, sebagian melihat bahwa terorisme berdasarkan tujuannya yaut bentuk spesifik dari

²³ Lutz, J. M., & Lutz, B. J. (2005). *Terrorism: Origins and Evolution*. New York: Palgrave Macmillan.

kekerasan politik yang melibatkan penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap warga negara, sarana umum, bertujuan untuk membawa atau menghentikan kekuasaan politik yang sah. Lainnya melihat terorisme sebagai metode yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan politik.²⁴ sedangkan P Schmid mendefinisikan : “*terrorism is usually an instrument for the attempted realization of a political or religious project that perpetrators lacking mass support are seeking, that it generally involves a series of punctuated acts of demonstrative public violence, followed by threats of more in order to impress, intimidate and or coerce target audiences.*”²⁵

Teror pada awalnya adalah sebuah keadaan pikiran atas ketakutan yang sangat besar atas bahaya yang sangat menakutkan pada level individu dan atas ketakutan yang melingkup pada level kolektif. Di sisi lain, terorisme adalah sebuah aktifitas, metode, atau taktik yang merupakan hasil dari perasaan psikologis bertujuan menghasilkan ‘teror’. Singkat kata, terorisme sebenarnya merupakan sebuah bentuk ‘perang psikologis’ yang bertujuan menyebarkan ketakutan yang terus diakumulasi dalam masyarakat secara simbolistik.

Definisi operasional lain tentang terorisme ini bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

²⁴ Crenshaw, M. (1992). Current research on terrorism: The academic perspective. *Studies in Conflict & Terrorism*, 15(1), 1-11. Moghaddam, F. M., & Marsella, A. J. (2004). *Understanding terrorism: Psychosocial roots, consequences, and interventions*. American Psychological Association.

²⁵ Schmid, A. P. (Ed.). (2011b). *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York: Routledge.

Dari berbagai pengertian yang ada, paling tidak terdapat benang merah yang disepakati oleh banyak ahli mengenai ciri utama dalam gerakan terorisme yakni:

- 1) bahwa aksi atau gerakan tertentu yang menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- 2) gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, atau masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu atau individu;
- 3) gerakan ini mengatur para anggotanya dengan cara teror juga; dan
- 4) bahwa individu atau gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Sederhananya, dari berbagai definisi terorisme, ada beberapa elemen yang erat kaitannya dengan kegiatan terorisme yakni target, tujuan, motivasi, dan legitimasi. Dengan kata lain, kegiatan terorisme dipastikan memiliki latar belakang motif tertentu seperti agama, motif ekonomi, balas dendam, dan disparitas sosial ataupun motif lainnya. Menurut James Lutz dan Brenda Lutz terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi karakteristik sebuah kelompok melakukan tindakan terorisme atau dianggap sebagai organisasi teroris yaitu: Terorisme melibatkan tujuan dan motif politik. Ia merupakan tindak kekerasan atau tindakan mengancam dengan kekerasan. Terorisme dirancang untuk menghasilkan ketakutan bagi sasaran yang pada ujungnya menjadi korban kekerasan itu sendiri. Kekerasan ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang secara jelas teridentifikasi. Kekerasan yang dilakukan melibatkan aktor non-negara atau aktor yang bertindak baik sebagai pelaku, maupun korban kekerasan, atau keduanya. Pada akhirnya tindakan kekerasan tersebut yang dirancang untuk menciptakan kekuatan pada situasi di mana kekuasaan yang ada telah berkurang atau kehilangan legitimasinya (seperti kekerasan untuk

meningkatkan basis kekuatan organisasi untuk melakukan sebuah tindakan tertentu).²⁶

Berdasarkan beberapa serangan terakhir, terjadi perubahan karakter serangan terorisme yang dilakukan oleh individu yang teradikalisasi secara mandiri (*lone wolf*). Istilah Lone wolf merujuk pada kegiatan terorisme yang dilakukan secara individual atau bagian dari kelompok, organisasi teroris, atau bagian dari institusi pemerintahan yang menggunakan aktivitas terorisme seperti peperangan.²⁷

Proses Deradikalisasi Mantan Napi Teroris

Keberadaan kelompok ekstrimis Lamongan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pesantren al-Islam di desa Tenggulun, kecamatan Solokuro, kabupaten Lamongan. Desa Tenggulun merupakan salah satu desa terpencil terletak ditengah hamparan sawah kering dan tambak ikan, pohon pisang dan tanaman jagung. Sebelum memasuki desa hamparan hutan jati dadapan terdapat pinggiran ladang kering . Jarak desa Tenggulun dengan kota Lamongan lebih kurang lebih 60 Km. Untuk mencapai desa tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat, namun tidak tersedia angkutan umum. Angkutan umum hanya sampai di persimpangan Paciran jalan ke Kecamatan Solokuro. Kemudian kedalam berjarak 10 KM di tempuh dengan ojek, demikian pula dari Desa Solokuro (ibukota kecamatan) ke Desa Tenggulun berjarak 7 Km di tempuh dengan mengendarai ojek.

Cerita panjang pendirian pesantren al-Islam dimulai dari Kakek Chozin, Ketua yayasan Pesantren al-Islam--telah mendirikan pesantren salaf pada zaman pendudukan Belanda. Leluhur keluarga mereka adalah orang yang mengawali dakwah di desa ini. “Memang diakui masyarakat sini bisa baca bismillah, bisa fatehah itu ya dari nenek moyang kami,” ujarnya. Setelah sekian waktu pesantren tersebut hadir, sejumlah

²⁶ Lutz, J. M., & Lutz, B. J. (2005). *Terrorism: Origins and Evolution*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 14

²⁷ Berntzen, L. E., & Sandberg, S. (2014). The collective nature of lone wolf terrorism: Anders Behring Breivik and the anti-Islamic social movement. *Terrorism and Political Violence*, 26(5), 759-779.

persoalan membuat pondok mulai redup. Persoalan pertama adalah ketika kakek Chozin wafat saat belajar di Arab Saudi. Akhirnya pondok kehabisan kader dan lambat laun pesantren pertama berhenti. Setelah sekian lama vakum, Chozin yang telah dewasa mulai tergugah untuk segera menghidupkan kembali pesantren yang telah dirintis nenek moyangnya. Harapan itu semakin nyata ketika adik kandungnya Ali Gufron (Muchlas) lulus dari Ponpes Al Mukmin Ngruki tahun 1985. Namun pada tahun yang sama Muchlas diamanati untuk mengabdikan di Afganistan selama lima tahun. Pada tahun 1990, Muchlas pulang namun tidak langsung ke Tenggulun. Ia pulang ke Malaysia dan dinikahkan dengan wanita Malaysia oleh Uztadz Abu Bakar Baasyir dan Ustadz Abdulah Sungkar. Setahun kemudian, yakni 1991 Muchlas pulang ke Tenggulun untuk memperkenalkan isterinya. Ia hanya sekitar satu bulan tinggal dan kemudian berangkat kembali ke Malaysia untuk mulai merintis Ponpes Lukmanul Hakim.

Di Tenggulun, Chozin juga mulai merintis pesantren al-Islam. Awalnya, Chozin berkonsultasi dengan pengelola Al Mukmin Ngruki tentang keinginannya mendirikan pesantren di Tenggulun. “Setelah banyak melihat banyak pesantren satu-satunya pesantren yang menurut saya pas itu hanya Al Mukmin Ngruki. Kami melihat kedisiplinan santrinya juga kedisiplinan pengelolaannya,” ujar. Berlanjut pada tahun 1992 sekitar bulan Juli, ia bersama tokoh Muhammadiyah setempat termasuk adik kandungnya Jakfar Sodiq melakukan rapat perencanaan membahas konsep pesantren. Baru pada tahun 1993, al Islam mulai melakukan kegiatan belajar mengajar. Afiliasi ini berbentuk pada bantuan guru atau pengajar yang diterima al-Islam dari al-Mukmin, Ngruki.

Sebagaimana pesantren induknya, pesantren al-Islam bertujuan untuk mengajarkan dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*. Proses indoktrinasi jihad dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Beberapa sumber doktrin Jihad adalah buku-buku dari Syeh Dr. Abdullah Azzam yang memang diketahui salah satu ideolog kelompok Salafi Jihadi, yang kitab-kitabnya banyak mengajarkan tentang prinsip dan penerapan Islam murni dan Islam *kaffah*. Pesantren al-Islam juga mengajarkan pelatihan militer dan perang, khususnya yang diajarkan oleh para ustad/pengajar Pesantren Al Islam yang pernah menjadi murid

dan pelatih di berbagai akademi militer mujahidin, baik Mindanao, Poso, Ambon dan Afganistan. Proses indoktrinasi jihad, dilakukan oleh para tokoh radikal utama, seperti Ustad Abu Bakar Baa'syir. Sementara, indoktrinasi jihad dari keluarga Ustad Chozin, setelah dari Ngruki adalah diperoleh di Malaysia, Filipina, Thailand/Moro dan Afganistan. Diketahui, bahwa Ali Gufron, Ali Imron dan Ali Fauzi adalah alumni Akademi Mujahidin Afganistan dan Camp Pelatihan Militer di Mindanao Filipina.

Selain kondisi aktivitas pesantren al-Islam yang tertutup dan sembunyi-sembunyi, keberhasilan dalam menanamkan indoktrinasi jihad bagi para santrinya juga disebabkan oleh sifat apatis penduduk desa Tenggulun. Penduduk Desa Tenggulun berjumlah 2183 jiwa. mereka kebanyakan bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil dan pekerja swasta. Sebagian warga ada yang bekerja sebagai di luar Negeri (Malaysia). Fenomena sosial yang berkembang di Desa Tenggulun lainnya adalah, dimana akibat dari banyaknya penduduk Desa yang pergi menjadi TKI, sehingga kawin cerai di Desa Tenggulun merupakan hal yang biasa, apalagi kalau yang pergi bekerja keluar negeri adalah salah satu saja dari pasangan suami istri. Orang yang di tinggal maupun yang meninggalkan untuk bekerja tersebut, menikah lagi di tempat masing-masing.

Dalam masa-masa selanjutnya, perkembangan ideologi radikal mampu berkembang pesat di Pesantren Al Islam. Hal ini juga didukung oleh sikap warga Tenggulun yang mayoritas adalah warga Nahdliyin (NU) yakni sekitar 90% (kurang lebih 2263 jiwa) dan Muhammadiyah sekitar 10% (kurang lebih 251 jiwa) yang cenderung diam membiarkan segala aktifitas terkait dengan keberadaan Pesantren Al Islam. Respon masyarakat Tenggulun terhadap berdirinya Al Islam cukup beragam. Warga Nahdliyin yang menjadi mayoritas tidak terlalu merespon. "Ya masyarakat sini itu masa bodoh saja," kata Chozin. Karena didirikan oleh Muhammadiyah, masyarakat menilai tujuan utama Al Islam adalah pengkaderan. Di dalam warga Muhammadiyah sendiri terjadi pro kontra. Mereka yang bersimpati melihat Al Islam sebagai usaha dakwah yang tepat. Sementara mereka yang kontra menilai jika ciri pakaian Al Islam tidak sesuai. Meskipun Pesantren Al Islam mengajarkan aqidah

yang berbeda dengan aqidah kebanyakan warga, yakni NU dan Muhammadiyah. Sikap yang sama juga dilakukan oleh aparat Pemerintahan Desa Tenggulun. Kondisi berdampak pada keterlibatan guru dan alumni al-Islam dalam konflik komunal-agama di Ambon dan Poso, dan mereka menjadikan Poso sebagai basis perjuangan dan pusat pelatihan.

Keterlibatan guru dan santri dalam wilayah konflik, menarik mereka pada jaringan Jama'ah Islamiyah, melalui syarat yang tidak mudah. Mereka harus mengikuti seleksi terlebih dahulu, lalu *baiat* oleh *amir*. Anggota juga tak cukup hanya beragama Islam. Tetapi, Islam dengan aliran *salafush sholih*. Setelah masuk menjadi anggota, mereka dikenai kewajiban membela dan melindungi *amir*, taat aturan, tidak melakukan perbuatan *mudlarat* kepada jamaah dan saling melindungi antar jamaah dalam segala hal, terutama mengenai JI. Mereka juga punya hak mendapatkan kesejahteraan, bimbingan agama, dan perlindungan. Sumber keuangan mereka untuk mendanai program-programnya diambilkan dari *infaq*, *zakat*, dan *sodaqoh* serta sumber-sumber yang dianggap halal. Sumber lain ini tidak sembarangan, sebab JI hanya mau menerimanya setelah ada *ijtihad* (diskusi dan perdebatan para ahli apakah diperbolehkan atau tidak). Pesantren al-Islam kemudian menjadi salah satu pesantren yang terlibat dalam unit operasi khusus Jama'ah Islamiyah (JI). Banyak operasi pemboman JI -- pemboman Malam Natal 2000, serangan terhadap duta besar Filipina di Jakarta dan pemboman Bali--sebagian direncanakan atau dimulai dari al-Islam. Sebagaimana yang diungkapkan Ali Fauzi "Kampung ini pernah geger karena bom bali yang dirakit di rumah kami."

Untuk itu bisa digambarkan bahwa perkembangan kelompok ekstrimis Lamongan terbangun berdasarkan beberapa keterkaitan hubungan, yaitu Jaringan Alumni Pesantren al-Islam dan beberapa pesantren yang berafiliasi ke Jama'ah Islamiyah (JI); kuatnya komitmen ideologi jihad serta kekeluargaan dan pernikahan. Kelompok ini bukan hanya organisasi teroris, mereka merupakan komunitas sosial tertutup dan jaringan yang kuat. perkembangan terakhir, bahwa kelompok ekstrimis Lamongan beberapa tahun ini berubah menjadi sentimen pro-ISIS. Jejak sebuah jaringan ekstrimis di Lamongan Jawa Timur

menggambarkan bagaimana dukungan atas perlawanan jihad lokal telah bertransformasi menjadi dukungan bagi ISIS,”

Keterlibatan Ex-Jihadis Dalam Deradikalisasi

1. Motivasi Perubahan

Peletakan batu pertama renovasi Masjid Baitul Muttaqin dan pembangunan Taman Pendidikan al-Quran (TPA) di Solokuro, Lamongan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 menjadi tanda dimulai beroperasinya kegiatan Yayasan Lingkar Perdamaian. Yayasan didirikan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan mantan kombatan diharapkan dapat memberikan harapan bagi aktivis mantan Narapidana (napiteroris) untuk dapat berdaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh inisiator pendirinya, Ali Fauzi “*Selama ini kami selalu bingung ketika ada napi terorisme keluar dari penjara dan bingung mau apa. Cari kerjaan sulit, tapi ada anak-istri yang harus dihidupi*”.²⁸ Kehadiran YLP diharapkan dapat memberikan wadah bagi mantan napi teroris yang memberikan support pada anggotanya dengan gaya yang sama tetapi dengan muatan berbeda. Menjunjung nilai-nilai perdamaian, cinta kasih, toleransi dan mendakwahkan islam ramah bukan marah. Para aktor YLP diharapkan mampu mendedikasikan dirinya bagi menciptakan keadilan dan perdamaian melalui cara-cara tanpa kekerasan, beroperasi pada berbagai jarak dari konflik yang mengancam jiwa, dalam berbagai hubungan dengan komunitas religius dan struktur resminya, dan dalam beberapa pengaturan mungkin terlihat terlalu birokratis, rutin, atau aman.

Urgensi pemberdayaan yang dilakukan oleh YLP, paling tidak didasari oleh dua alasan penting. *Pertama*, Kemampuan yang dimiliki oleh napiter dalam menggunakan senjata, agitasi dan propaganda di ‘medan peran’, dan membuat bom, berdampak pada hambatan lapangan pekerjaan yang bisa menampung. *Kedua*, adanya *stereotype* mantan teroris menjadikan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan mereka. Gambaran itu sebagaimana diungkapkan

²⁸ Wawancara Ali Fauzi

oleh *Sumarno*,²⁹ “...kita mengalami sebuah kejadian yang sangat pahit, ketika semua orang gak ada yang mendekati...”

Untuk itu kiranya penting pemberdayaan bagi mantan kombatan ini, Ali Fauzi, merasa terpanggil untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan, “Jika tidak ada yang mau peduli, biasanya nanti malah melakukan aksi lagi,” paling tidak mereka tidak terlibat lagi dalam jaringan teroris. Perubahan ini juga mendapatkan dukungan dari BNPT, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala BNPT Suhardi begitu bergembira ketika justru para mantan kombatan itulah yang mengambil inisiatif. Tanpa banyak bicara, dia langsung setuju untuk membantu dan memfasilitasi. “Gerakan-gerakan seperti inilah yang paling efektif untuk menekan laju terorisme,” tambahnya. Suhardi mengungkapkan, saat ini total ada 1.500-an napi terorisme dan sekitar 560-an yang baru saja keluar sepanjang 2016. Yang menggembirakan, imbuh Suhardi, hanya tiga napi terorisme yang kembali melakukan aksi teror. ”

Meski sebagian aktivis kelompok ekstrimis Lamongan telah bermetamorfosis menjadi kelompok yang berorientasi pada upaya-upaya deradikalisasi dan perdamaian, namun tidak lepas dari dinamika pro dan kontra internal maupun eksternal kelompok. Dinamika internal terjadi berhubungan dengan pesentren al-Islam dan Anggota Jaringan JI. Dinamika dalam pesentren tergambar dalam wawancara dengan ust. Chozin,”.....”. Ali Fauzi, “masih banyak kawan yang mencurigai aktivitas yang kami lakukan”. Meskipun eksternal kelompok, Wawancara salah satu pegawai pemerintah daerah mengungkapkan bahwa:

“Karena semuanya dikendalikan oleh teori konspirasi tersebut tapi kan kita cuma bisa melihat fakta bahwa hari ini mereka yang aktivis-aktivis teror itu awalnya sekarang itu sudah berubah menjadi proses deradikalisasi.”

Terlepas dari dinamika pro dan kontra keberadaan YLP, diharapkan dari kelompok ini terbangun ‘komunitas baru’, di mana

²⁹ Wawancara Sumarno

secara bertahap dapat menentang keyakinan ekstrimis dari keluarga mereka yang dipenjarakan. Ali Fauzi mengungkapkan:

“Penting ketika mereka butuh kita hadir. Hanya kalau terlalu diteorikan itu yang susah. Saya sudah profiling lebih dari 40 kawan dan murid sendiri, kenapa mereka balik? mereka gabung kelompok lama. Yayasan ini sebagai alternatif untuk membuat komunitas baru. Sebenarnya sama biar ada saling taawun, tapi muatannya beda. Kalau mereka menyuarakan kekerasan, kita perdamaian. metodenya sama. Contoh kalau mereka ada proyek ke yaman, ya kita juga ke yaman tapi kan muatannya beda. mereka senang naik gunung kita juga sama, tapi muatannya beda. itu yang terpenting. lebih ideal lagi jika yayasan ini didukung mereka bisa kita jadikan kontra naratif, itu ya belum ada.”

Yayasan Lingkar Perdamaian telah mengidentifikasi sekitar selusin keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi. Jika sebuah keluarga mengalami kesulitan untuk menemukan dana sekolah untuk anak-anak mereka, dia membantu mereka mendaftar di al-Islam untuk apa-apa. Mereka juga secara bebas mengepresikan pandangan-pandangan tentang *jihad* tanpa perlu takut untuk dikucilkan dari kelompoknya, karena mereka mendapatkan penguatan dari teman satu komunitas tersebut. Selain itu, individu yang tergabung bisa mengekspresikan aspirasinya, kebutuhan ekonomi dan keyakinan ideologinya tanpa rasa takut dan was-was.

2. Upaya-Upaya pemberdayaan

Kolaborasi antar stakeholder

Program yang pertama kali dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian adalah melakukan kolaborasi dengan para *stakeholder*, dimana para *stakeholder* ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan dan kelangsungan upaya pemberdayaan mantan narapidana teroris. Jika para *stakeholder* dapat bersinergi dengan baik maka kelangsungan deradikalisasi di Solokuro akan berjangka panjang.

Pertama, Peran pesantren al-Islam menjadi sangat penting dalam keberlangsungan program ini, karena komunitas ini dipertemukan atas keterikatan mereka dengan pesantren al-Islam. Hampir semua eksponen Yayasan Lingkar Perdamaian mempunyai hubungan dengan al-Islam, baik sebagai keluarga pendiri, guru maupun santri. Dukungan terhadap Yayasan Lingkar Perdamaian sejalan seiring dengan perubahan yang terjadi di pesantren al-Islam. Bagi pesantren al-Islam, keterlibatan para ustad/pengajar, santri dan alumni Pesantren Al Islam dalam kasus Bom Malam Natal tahun 2000 dan Kasus Bom Bali tahun 2002, benar-benar menjadi titik balik untuk melakukan perubahan orientasi pesantren, dari *jihad-dakwah-tarbiyah*, menjadi *tarbiyah-dakwah-jihad*. Upaya Pesantren al-Islam dalam rangka meredusir paham radikal di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan akulturasi dengan lingkungan sekitar, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti Komite Sekolah dan bergabung dengan Muhammadiyah, membentuk Dewan Pengasuh dan terlibat aktif dalam kegiatan deradikalisasi.

Kedua, Masyarakat lokal desa Tenggulun dan pengusaha mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian. Desa Tenggulun sendiri merupakan salah satu desa terpencil di kecamatan Solokuro, Lamongan. Jarak desa ini dari Kota Lamongan Jawa Timur lebih kurang 60 Km. Penduduk Desa Tenggulun berjumlah 2183 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penduduk desa Tenggulun kebanyakan bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil dan pekerja swasta. Sebagian warga ada yang bekerja sebagai di luar Negeri (Malaysia). Fenomena sosial yang berkembang di Desa Tenggulun lainnya adalah, dimana akibat dari banyaknya penduduk Desa yang pergi menjadi TKI, sehingga kawin cerai di Desa Tenggulun merupakan hal yang biasa, apalagi kalau yang pergi bekerja keluar negeri adalah salah satu saja dari pasangan suami istri. Orang yang di tinggal maupun yang meninggalkan untuk bekerja tersebut, nikah lagi di tempat masing-masing.

Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Pusat, Kepolisian, Militer dan BNPT. Sebagaimana yang diatur dalam perundangan bahwa aksi-aksi terorisme merupakan permasalahan nasional, maka penyelesaian permasalahan di urus oleh pemerintah pusat melalui bidang

Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT). Badan ini dalam mendesain program deradikalisasi memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Kobarasi pemerintah akan menghasilkan hal-hal kerjasama terungkap dalam wawancara dengan Ali Fauzi,

“ya mungkin sementara ini belum ada funding emang. yang jadi andalan kita ya kita punya partner untuk donatur kita dari kawan2 pengusaha lokal, juga kawan-kawan yang punya usaha di tenggulun, di wilayah lamongan kita rekrut untuk mendanai. Kalau dana dari pemerintah sebelumnya nggak ada dana untuk mendukung program kerja, mungkin di tahun 2018 baru kita ajukan dana ke pemkab lamongan karena mereka juga care dengan yayasan ini. Sudah banyak dari kawan-kawan yang sudah kita berdayakan. Ada yang kebanyakan kita titipkan di proyek kawan-kawan pengusaha”.

Pada upaya ini bentuk pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat, ketika institusi pemerintah dan masyarakat belum memberikan bentuk konkrit dalam pemberdayaan. Hasil wawancara dengan Ali Fauzi mengungkapkan: *”bahwa aksi-aksi teror yang dilakukan pada jihadis merupakan salah satu kritik atas ketidakhadiran negara”*. Banyak kegiatan-kegiatan deradikalisasi merupakan hasil iuran dari aktivis dan sumbangan dari simpatisan.

Pendekatan Sosial dan Budaya

Pendekatan dilakukan oleh pihak Yayasan Lingkar Perdamaian dalam upaya deradikalisasi tebagi menjadi dua yaitu bersifat non material, seperti perubahan ideologi jihad dari pemahaman jihad yang diartikan sebagai berperang, membunuh, berbuat keras pada orang-orang kafir musuh-musuh Islam menjadi jihad pada amal ibadah. Maka, tidak heran bila muncul pelaku-pelaku teroris lama, karena doktrin mereka memang masih melekat kuat. Mencegah mereka menggunakan media sosial tentu pekerjaan berat, apalagi sekarang menjadi trend anak muda. Yang bisa ditempuh adalah melakukan kegiatan pencerahan.

Proses induktifikasi tersebut dilakukan dengan pendekatan persaudaraan melalui lembaga formal maupun non formal, melalui *dauroh*, *i'dad*, *rihlah*, *mukhooyamah*, dan lain sebagainya. tasamuh/toleransi. Kedua bersifat material, berupa pinjaman lunak, pinjaman modal, pemberian biaya sekolah anak-anak mereka, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Meski sifat pemberdayaan material masih bersifat pribadi, "bentuk usaha pribadi ada. Modal akhirnya ada, tapi setahap demi setahap. Sekarang bagaimana awalnya kita bangun perspektif bahwa perdamaian itu lebih indah. Memberikan terapi biar mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau mengandalkan dana dari pemerintah itu biasanya fokus ke program. Keberhasilan membangun komunitas baru sangat bergantung pada dukungan non material dan material, kedua support itu harus diberikan secara simultan dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

Ali Fauzi, Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian menyatakan, terorisme merupakan sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. "Akar terorisme sudah banyak dibahas oleh para pakar bahwa pakarnya tidak tunggal, bahkan saling berkaitan oleh karenanya penanganannya juga tidak boleh tunggal harus banyak aspek, prefektif dan metodologi," ucapnya. Bahkan, Ali mengibaratkan terorisme sebagai sebuah penyakit yang sudah dalam keadaan yang menghawatirkan dan perlu penanganan yang lebih khusus. "Ibarat sebuah penyakit teroris ini sudah komplikasi butuh spesialis dan kampanye perdamaian dari orang-orang yang pernah terjangkit penyakit ini. Kami pernah mengalami virus ini bertahun-tahun, tapi Alhamdulillah kami bisa sembuh dan bangkit dan ingin menyembuhkan yang lainnya," urainya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, untuk tantangan lebih berat, karena terorisme yang ada di Indonesia ini sudah terpengaruh dengan terorisme global. "Tantangan kedepan masih cukup banyak, mengingat terorisme lokal selalu dipengaruhi oleh terorisme global," terangnya. Meskipun begitu, tambah Ali perlu ada pencegahan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. "Masyarakat harus dilibatkan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ini tugas kita bersama-sama

untuk menyatukan perspektif, bahwa teror tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengguncang negara,” terangnya

Penutup

Upaya Jihadis untuk memberdayakan mantan tahanan teroris sebagai fenomena yang menarik dan unik. Keterlibatan jihadis dalam reintegrasi Bekas Tahanan Teroris sebagai bantuan timbal balik bagi banyak ekstrimis Islam yang berjuang dengan transisi kembali ke masyarakat tanpa bantuan yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya para Jihadis pada pelepasan dan reintegrasi program-program inisiatif mantan ekstremis. Bagaimana mereka terlibat dalam pembatasan ideologi radikal melalui program pembangunan masyarakat dan ekonomi dan mengintegrasikan kembali ekstremis ke dalam masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa keterlibatan para pejihad dalam inisiatif pemberdayaan sebagai alternatif dari program deradikalisasi pemerintah dari mantan tahanan teroris. Kelompok ini menjadi ‘komunitas baru’ bagi mantan ekstremis untuk mengekspresikan berbagai pandangan dan kepercayaan tanpa penyembunyian. Kehadiran kelompok ini adalah aset potensial dalam mempromosikan narasi melawan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Pustaka Acuan

- Altier, Mary Beth, Emma Leonard Boyle, Neil D. Shortland, and John G. Horgan. (2017) “Why they leave: An analysis of terrorist disengagement events from eighty-seven autobiographical accounts.” *Security Studies* 26, no. 2: 305-332.
- Appleby, S.R. (1999) *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Ashour, O. (2009). *The de-radicalization of Jihadists: Transforming armed Islamist movements*. Routledge. McCauley, C., & Moskalenko, S. (2013). Two Possible Profiles of Lone-actor Terrorists. *This report represents the views and opinions of the*

- contributing authors. The report does not represent official USG policy or position.*, Moghaddam, F. M. (2005). The staircase to terrorism: A psychological exploration. *American psychologist*, 60(2), 161.
- Barrelle, Kate. (2015) "Pro-integration: disengagement from and life after extremism." *Behavioral sciences of terrorism and political aggression* 7, no. 2: 129-142.
- Berntzen, L. E., & Sandberg, S. (2014). The collective nature of lone wolf terrorism: Anders Behring Breivik and the anti-Islamic social movement. *Terrorism and Political Violence*, 26(5), 759-779.
- Bjorge, Tore & John Horgan (eds.), (2009). *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*, New York: Routledge.
- Bjorgo, T., & Bjørgo, T. (2013). *Strategies for preventing terrorism*. Springer.
- Chalmers, I. (2017). Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists. *Asian Studies Review*, 41(3), 331-351.
- Charles, Tilly (1978). From mobilization to revolution. *Reading, Addison-Wesley Publishing*.
- Crenshaw, M. (1992). Current research on terrorism: The academic perspective. *Studies in Conflict & Terrorism*, 15(1), 1-11.
- Moghaddam, F. M., & Marsella, A. J. (2004). *Understanding terrorism: Psychosocial roots, consequences, and interventions*. American Psychological Association.
- Harris-Hogan, Shandon (2017). "Violent extremism in Australia: An overview." *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 491: 1.
- Horgan, J. (2008). Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation. *Perspectives on Terrorism*, 2(4), 3-8.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44154828>
- Hwang, J. C. (2018). *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*. Cornell University Press; Hwang, Julie

- Chernov, Rizal Panggabean, and Ihsan Ali Fauzi (2013). "The disengagement of jihadis in Poso, Indonesia." *Asian Survey* 53, no. 4: 754-777.
- Jacobson, Michael. (2010) "Terrorist dropouts." *Learning from those who have left (Policy Focus, 101)*, Washington: The Washington Institute for Near East Policy, 75.
- Lentini, P. (2008). Understanding and combating terrorism: Definitions, origins and strategies. *Australian Political Studies Association*, 43(1), 133-140.
- Lipset, S. M., & Raab, E. (1970). *The politics of unreason: right wing extremism in America, 1790-1970* (Vol. 5). New York: Harper & Row.
- Lutz, J. M., & Lutz, B. J. (2005). *Terrorism: Origins and Evolution*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lutz, J. M., & Lutz, B. J. (2005). *Terrorism: Origins and Evolution*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 14.
- Rabasa, A., Pettyjohn, S. L., Ghez, J. J., & Boucek, C. (2010). *Deradicalizing Islamist Extremists*. RAND Corp Arlington VA National Security Research Div.
- Rabasa, A., Pettyjohn, S. L., Ghez, J. J., & Boucek, C. (2010). *Deradicalizing Islamist Extremists*. RAND Corp Arlington VA National Security Research Div.
- Schmid, A. P. (Ed.). (2011b). *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York: Routledge.
- Silber, M. D., Bhatt, A., & Analysts, S. I. (2007). *Radicalization in the West: The homegrown threat* (pp. 1-90). New York: Police Department. Ada beberapa istilah lainnya yang sering digunakan untuk menggambarkan radikalisme yaitu militan, ekstremis, zealot, dan fundamentalis.
- Tambiah, S. J. (1996). *Ethnonationalist conflicts and collective violence in South Asia*. University of California Press.